



Dari Yogyakarta ke Pelosok Nagari: Aisyiyah dan Modernisasi Perempuan di Nagari Kubang (1930-1945)

From Yogyakarta to the Minangkabau Heartland: Aisyiyah and the Modernization of Women in Nagari Kubang (1930-1945)

Khairanis*, SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to provide an overview of the establishment of Aisyiyah in Yogyakarta and its development and role in Kenagarian Kubang, Minangkabau, during the period of 1930-1945. The women's movement in Indonesia has undergone a long historical evolution, and during the national movement era, women had established formal organizations dedicated to improving their conditions at that time. These formal organizations were not only city-based but also village-based, as exemplified by the Aisyiyah Organization in Kubang. As an autonomous organization under Muhammadiyah, Aisyiyah was granted the authority to manage charitable activities in the social, religious, educational, and vocational fields. This article analyzes how Aisyiyah contributed to enhancing the welfare and education of women in Kubang, as well as its role in the social and religious movements in the region.

ARTICLE HISTORY

Received 10/06/2024
Revised 11/06/2024
Accepted 13/06/2024
Published 15/06/2024

KEYWORDS

Aisyiyah; women movement; activism; Nagari Kubang.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ khairanis@gmail.com

PENDAHULUAN

Perlu kita kenang sejenak riwayat berdirinya Aisyiyah. Almarhum K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sejak tahun-tahun pertama setelah Muhammadiyah berdiri pada 1912, telah menyadari pentingnya memajukan kaum wanita Islam. Melalui tangannya, Ahmad Dahlan memberi bekal kepemimpinan dan mendorong istrinya untuk mendirikan organisasi kaum wanita pertama, yang diberi nama *Sopo Tresno* (Siapa Cinta) pada tahun 1914 (Mahabbah, 1983). Kegiatan perkumpulan ini mengutamakan bidang tabligh, pendidikan, dan sosial. Misi awal yang dirintis organisasi *Sopo Tresno* pada dasarnya merupakan usaha memperjuangkan keadilan gender dengan cara melawan hegemoni yang merendahkan perempuan melalui dekonstruksi ideologi (Fakih, 2006).

Ide pendirian Aisyiyah oleh pendiri Muhammadiyah membuktikan bahwa Ahmad Dahlan menyadari perlunya membangun hubungan relasi dengan perempuan dan menghapus stereotipe terhadap perempuan pada masa itu. Stereotipe tersebut menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus kasur, sumur, dan dapur saja. Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga) (Fakih, 2006). Masing-masing komponen ini terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Jika terjadi gejolak, masing-masing komponen akan cepat menyesuaikan diri untuk mencari keseimbangan kembali.

Sejak *Sopo Tresno* berganti nama menjadi Aisyiyah pada tahun 1915, organisasi wanita Islam ini eksis bertahan hingga kini. Aisyiyah merupakan organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah. Organisasi ini bergerak dan memperjuangkan nasib kaum ibu atau muslimah Indonesia (Mahabbah, 1983). Aisyiyah semakin melebarkan sayap dan amal usahanya dengan mendirikan badan penolong yatim piatu dan fakir miskin, memberantas buta huruf, menyantuni korban bencana alam, dan sebagainya. Kaum perempuan juga dianjurkan memasuki jenjang pendidikan seperti di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), di samping mengkaji pengetahuan agama. Perkembangan Aisyiyah di *Regentschap* (Karesidenan) 50 Kota seiring dengan berdirinya Muhammadiyah Kubang pada tanggal 25 Desember 1929. Muhammadiyah Kubang didirikan oleh empat orang penghulu dari Kerapatan Adat Kubang, yakni HN. Khalil, Darwis Muin, dan H. Mansyur (Wawancara dengan Hj. Rosma Djanin di Kubang, tanggal 8 September 2010). Setahun kemudian, Aisyiyah Ranting Kubang resmi berdiri pada tanggal 25 Februari 1930 oleh Fatimah Luwis (istri H. M. Khatib).

Pada awal pendirian, aktivis Aisyiyah mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengajak kaum perempuan bergabung dalam organisasi Aisyiyah. Ajakan ini umumnya bersifat himbauan dan tidak dipaksakan. Seperti penuturan



Rosma Djanin, para pengurus Aisyiyah datang ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak mereka menghadiri pengajian yang diadakan oleh pengurus Aisyiyah serta memperkenalkan organisasi tersebut kepada kaum perempuan. Sejak pendiriannya, aktivis Aisyiyah Kubang sangat tekun membina kaum perempuan. Selain memberikan pengajian, mereka juga memberikan pengaderan, latihan kepemimpinan, latihan dasar keterampilan seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya. Selain itu, para aktivis Aisyiyah mengelola amal usaha yang bergerak di bidang sosial, seperti mendirikan panti asuhan pada tahun 1930. Sepuluh tahun kemudian (1940), Aisyiyah Kubang membeli sebidang tanah di Caniago Padang Kubang untuk mendirikan panti asuhan.

Setahun setelah pendiriannya, status ranting Aisyiyah Kubang naik menjadi Cabang pada tahun 1940. Pada tahun 1942-1945, aktivitas Aisyiyah mengalami kevakuman (*mandeg*). Pada masa pendudukan Jepang, keberadaan organisasi otonom seperti Aisyiyah tidak diakui. Sejak itu, semua organisasi otonom di bawah Muhammadiyah dilebur menjadi satu. Tidak hanya itu, aktivitas Aisyiyah pun dibatasi pada pengajian saja. Inilah sisi menarik dari kajian perkembangan Aisyiyah di Kenagarian Kubang. Sebagai organisasi otonom di bawah Muhammadiyah, Aisyiyah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan amal usaha seperti organisasi induknya yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, metode pendekatan yang dilancarkan kaum perempuan di Aisyiyah dari pintu ke pintu menarik perhatian kaumnya untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Meskipun perkembangannya pesat, namun terdapat masa kevakuman pada tahun 1942-1945 akibat pendudukan Jepang.

Kajian Teori

Dalam kajian sejarah, Peter Burke menyoroti kurangnya perhatian terhadap perempuan, di mana pentingnya kontribusi mereka dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruh politik mereka sering diabaikan (Burke, [2003](#)). Namun, gerakan perempuan dan teori-teori yang muncul dari gerakan tersebut telah mendorong baik sejarawan perempuan maupun laki-laki untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang peran perempuan dalam sejarah. Salah satu model gerakan perempuan yang berkembang selama masa pergerakan nasional adalah emansipasi nasional (Wieringa, [1998](#)). Pada tahun 1912, Poetri Mardika menjadi salah satu organisasi perempuan formal pertama yang terbentuk, memiliki keterkaitan dengan organisasi nasional pertama, yaitu Boedi Oetomo. Organisasi-organisasi formal yang muncul selama periode pergerakan nasional telah menjadi fokus kajian sosiolog dan sejarawan (Burke, [2003](#)). Ketika organisasi-organisasi ini mendokumentasikan sejarah mereka, sering kali terkesan bahwa organisasi tersebut telah direncanakan dan didirikan secara sadar sejak awal. Oleh karena itu, penulisan sejarah gerakan organisasi seringkali sulit untuk memisahkan konteks masa kini dari masa lalu. Dalam konteks ini, penekanan pada konsep konseptual telah mendorong peneliti untuk memahami perubahan sekitar masa pendirian organisasi tersebut (Fakih, [2006](#)). Dengan demikian, pendekatan ini membuka peluang untuk memahami bagaimana organisasi-organisasi tersebut berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik di sekitarnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah (*historical research*) yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan memaparkan perkembangan organisasi Aisyiyah di Kenagarian Kubang pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan data sejarah terkait topik penelitian. Sumber data primer yang akan digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi organisasi Aisyiyah, arsip, laporan, surat kabar, dan majalah lokal pada masa itu, serta wawancara dengan pelaku sejarah atau saksi hidup yang terlibat dalam perkembangan Aisyiyah di Kenagarian Kubang. Sementara sumber sekunder yang akan dieksplorasi antara lain buku-buku, jurnal, artikel, tesis, dan disertasi yang membahas tentang sejarah Aisyiyah, organisasi wanita Islam, dan perkembangan sosial-politik di Sumatra pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis terkait. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait perkembangan Aisyiyah di Kenagarian Kubang, seperti anggota senior, tokoh masyarakat, atau sejarawan lokal. Analisis data akan dilakukan dengan metode analisis sejarah, yang meliputi kritik sumber (kritik ekstern dan intern), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, [2003](#)). Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikaji dan diinterpretasikan untuk menyusun narasi sejarah yang komprehensif tentang perkembangan Aisyiyah di Kenagarian Kubang pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber yang

berbeda. Selain itu, dilakukan *cross-check* dengan narasumber dan sumber-sumber lain untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh.

Metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memaparkan secara komprehensif perkembangan organisasi Aisyiyah di Kenagarian Kubang pada masa awal kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan sumber-sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan berbagai sumber data primer dan sekunder, serta melakukan analisis sejarah yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat tentang dinamika dan perjalanan organisasi Aisyiyah di wilayah tersebut pada periode waktu yang menjadi fokus kajian.

PEMBAHASAN

Proses Berdirinya Aisyiyah di Yogyakarta

Pada awal abad ke-20 di Indonesia, masyarakat mengalami berbagai penyimpangan dari ajaran Islam seperti bid'ah, syirik, dan khurafat. Selain itu, posisi perempuan Indonesia pada masa itu sangat memprihatinkan. Perempuan hanya ditakdirkan sebagai *konco wingking* (teman untuk urusan rumah tangga saja). Seperti di Jawa, perempuan menjadi subordinasi dari dominannya peran laki-laki. Dalam rumah tangga, budaya patriarki secara sistematis telah mengesampingkan peran perempuan. Anggapan bahwa perempuan nantinya hanya akan ke dapur dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi merupakan salah satu bentuk subordinasi (Fakih, 2006). Posisi ini menjadikan perempuan sebagai sumber kebodohan dan ketertinggalan.

Ajaran setiap agama, terutama Islam, menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan (*al'adli*). Alquran sebagai prinsip dasar moral tentang keadilan mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, kultural termasuk keadilan gender. Dalam beberapa ayat, seperti surat at-Taubah: 71, an-Nisa: 123, Ali Imran: 195, dan an-Nahl: 97, ditegaskan bahwa perempuan bukanlah subordinasi laki-laki. Islam menegaskan bahwa wanita tidak hanya bermain di sektor domestik saja. Namun, persoalan yang dihadapi perempuan adalah kultur masyarakat yang melanggengkan ketidakadilan gender.

K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menyadari persoalan perempuan yang lemah dan terpinggirkan tersebut. Ia membekali istrinya, Nyai Ahmad Dahlan, dengan metode kepemimpinan (Aisyiyah, 1992). Setelah mendapat bekal yang cukup, pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama *Sopo Tresno* (Siapa Cinta atau Siapa Suka) (Mahabbah, 1983). Kegiatan perkumpulan ini mengutamakan bidang-bidang seperti tabligh, pendidikan, dan sosial. Nyai Ahmad Dahlan selalu bekerja sama dan bergotong-royong dengan suaminya. Dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam pengembangan organisasi, Nyai Ahmad Dahlan tidak gentar atau mundur sedikit pun. Niatnya untuk membina kaumnya tetap dilanjutkan. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1917, *Sopo Tresno* diganti namanya menjadi Aisyiyah dan menjadi bagian dari Muhammadiyah (Aisyiyah, 1992).

Dalam peresmiannya, organisasi perempuan Islam pertama ini dibuka oleh K.H. Mokhtar pada tanggal 19 Mei 1917. Setelah berdiri, dibentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari Siti Bariyah (ketua), Siti Badilah (penulis atau sekretaris), Siti Aminah Harawi (bendahara), Ny. H. Abdullah (pembantu), Ny. Fatimah Wasool (pembantu), Siti Dalalah (pembantu), Siti Wadingah (pembantu), Siti Dawimah (pembantu), dan Siti Busyro (pembantu). Kegiatan Aisyiyah awalnya bergerak di kampung-kampung, kemudian berkembang keluar kampung dengan sifat lokal dan menggunakan bahasa komunikasi Jawa. Nyai Ahmad Dahlan juga aktif membina umat demi syiar agama Islam. Pada tahun 1919, Aisyiyah merintis pendidikan dini untuk anak-anak yaitu semacam *playgroup*, yang kemudian berkembang menjadi *Busthanul Athfal* (setingkat TK) yang tersebar di seluruh Indonesia. TK milik Aisyiyah kemudian diberi nama TK Aisyiyah *Busthanul Athfal*, yang menunjukkan betapa besar minat Aisyiyah terhadap pentingnya pendidikan untuk anak-anak sejak dini, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.

Pada tahun 1926, Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara Aisyiyah. Aisyiyah juga merupakan organisasi wanita yang memprakarsai dan menjadi sponsor terbentuknya federasi organisasi-organisasi wanita pada tahun 1928. Aisyiyah bersama-sama dengan organisasi wanita lainnya berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah serta belenggu kebodohan. Badan federasi tersebut diberi nama KOWANI. Melalui federasi ini, berbagai usaha atau amal dapat dikerjakan secara terpadu. Sebelumnya, organisasi wanita masih loyal dengan tujuan masing-masing.

Perkembangan Aisyiyah di Sumatera Barat dan Kubang

Sejarah perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat mencatat bahwa kehadiran Aisyiyah hanya beberapa tahun setelah berdirinya organisasi Islam modernis tersebut. Pimpinan Aisyiyah pertama di Sumatera Barat adalah Ummi Hindun Shahih dan Ummi Fatimah Latif. Cepatnya perkembangan Aisyiyah di Sumatera Barat disebabkan karena kaum wanita telah menyadari bahwa untuk memperjuangkan taraf kehidupan mereka, dibutuhkan suatu organisasi yang mampu membina dan mengarahkan mereka pada taraf yang lebih baik. Bertepatan dengan usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk mengembangkan organisasi keluar daerah Jawa, H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) sedang berada di Jawa dalam rangka mengunjungi anaknya, Fatimah, yang berada di Pekalongan. Setelah kembali dari Jawa, dia mengubah organisasi lokal yang telah berdiri di Sungai Batang, yaitu Sendi Aman Tiang Selamat, menjadi cabang Muhammadiyah pada tahun 1925 (Martimin, Taher, Amir, & Mahyuddin, [1978](#)). Seiring dengan berdirinya Muhammadiyah di Sumatera Barat tahun 1925, setahun kemudian, cabang Aisyiyah yang pertama di Sumatera Barat berdiri di Sungai Batang pada tahun 1926. Anggota pertama dari organisasi tersebut adalah Dariah (istri dari Haji Rasul) dan adiknya Hafsah (Abdullah, Zara, & Pratama, [2018](#)).

Kembalinya Fatimah Karim Amrullah (istri A. R Sutan Mansur) dari Pekalongan pada pertengahan tahun 1927 menjadikan keanggotaan Aisyiyah cabang Sungai Batang Maninjau semakin lengkap. Sejak itu, terbentuk kepengurusan Aisyiyah yang terdiri dari Hafsah sebagai ketua, Aisyiah sebagai sekretaris, dan Jamilah sebagai bendahara. Sedangkan anggotanya antara lain Dariah, Maimunah, Siti Raham, Ramisan, dan Fatimah Abdul Karim Amrullah (Hamka, [1982](#)). Perkembangan pesat Aisyiyah di Sumatera Barat, terutama di kawasan pedesaan, tidak lepas dari kemampuan manajerial kepemimpinan Aisyiah dengan mendekati dan mempengaruhi otoritas adat, pedagang, perantau, atau guru agama. Aisyiyah dan Muhammadiyah tidak secara langsung menentang otoritas adat yang ada di daerah tersebut, tetapi berusaha untuk mencapai posisi di tengah masyarakat. Usaha yang dilakukan itu membawa hasil yang baik kepada Aisyiyah karena perhatian masyarakat semakin besar terhadap organisasi tersebut, sehingga jumlah anggota Muhammadiyah dan Aisyiyah semakin bertambah. Pada April tahun 1927, diperkirakan jumlah anggota yang terdaftar di Muhammadiyah adalah 600 orang, anggota Aisyiyah berjumlah 512 orang, kemudian 8 bulan setelah itu bertambah menjadi 2.440 orang, separuh dari jumlah anggota tersebut adalah anggota Aisyiyah (Hamka, [1982](#)).

Pendirian Aisyiyah Payakumbuh berawal di Nagari Kubang, atau dua bulan setelah berdirinya Muhammadiyah Ranting Kubang, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1930 oleh Fatimah Luwis, istri H. M. Khatib, salah seorang pengurus Muhammadiyah Kubang (Wawancara dengan Rosma Djanin). Pada awal berdirinya, organisasi tersebut sudah terlihat aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Aktivistis Aisyiyah pada masa itu jumlahnya sedikit (berasal dari kalangan keluarga pendiri Muhammadiyah) dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengajak kaum wanita bergabung dalam organisasi Aisyiyah. Ajakan ini hanya bersifat himbauan dan tidak dipaksakan. Seperti penuturan Hj. Rosma Djanin, para pengurus Aisyiyah datang ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak mereka menghadiri pengajian yang diadakan oleh pengurus Aisyiyah serta memperkenalkan organisasi tersebut kepada kaum perempuan.

Aktivistis Aisyiyah Kubang sangat tekun membina kaum perempuan. Selain memberikan pengajian, mereka juga aktif mendirikan panti asuhan. Pada awalnya, pendirian panti asuhan menumpang di Mushola Baruah Kubang. Dalam menjalankan rumah panti asuhan, aktivis Aisyiyah mencari anak-anak yatim yang akan ditampung di tempat tersebut. Untuk menjalankan aktivitas pengelolaan rumah panti asuhan, aktivis Aisyiyah meminta sumbangan baik dari anggota maupun dari masyarakat (Wawancara dengan Latifah Anum). Namun, dalam periode berikutnya, hubungan antara Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah dengan otoritas adat setempat mengalami konflik. Konflik ini sebenarnya berawal dari ketegangan hubungan antara Muhammadiyah dan Kerapatan Nagari. Berdasarkan Ordonansi Nagari 1914, penghulu inti merasa lebih berkuasa karena mereka adalah anggota Kerapatan Nagari Kubang. Sementara itu, penghulu rendah (berada di Permusyawaratan Permufakatan) tidak mendapatkan tempat dan kekuasaan dalam nagari.

Anggota penghulu rendah merupakan pendiri Muhammadiyah di Kubang yang bekerjasama dengan pedagang di Payakumbuh berusaha mendirikan sekolah Yatim Piatu pada tahun 1928 dan mendapat restu Dewan Nagari. Perselisihan antara pendiri sekolah dengan lembaga nagari semakin meruncing ketika Muhammadiyah meningkatkan aktivitasnya setelah kampanye ordonansi guru pada akhir tahun 1928. Karena takut akan kemungkinan berpengaruhnya organisasi Aisyiyah dan Muhammadiyah di Kubang, maka lembaga nagari mengeluarkan resolusi tanggal 9 Januari 1929, yang melarang penyelenggaraan rapat dan pengajian agama dengan pembicaraannya dari luar daerah ataupun didukung oleh organisasi luar, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kekuasaan nagari (Suminto,

1985). Setelah pembangunan sekolah tersebut selesai pada Januari 1930, anggota penghulu rendah secara sepihak membubarkan sekolah Yatim Piatu tanggal 28 Maret 1930. Sebagai gantinya, kelompok penghulu rendah merencanakan untuk menggunakan gedung sekolah yang baru selesai untuk sekolah Muhammadiyah dan kursus Aisyiyah. Keputusan secara sepihak yang diambil oleh penghulu rendah tanpa meminta persetujuan dari Kerapatan Nagari Kubang menyulut konflik terbuka antara Muhammadiyah dengan otoritas adat Kubang. Maka, pimpinan nagari mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyiyah harus dibubarkan dan sekolahnya ditutup karena belum diakui oleh penghulu atau anggota dewan nagari.

Campur Tangan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik

Setelah keluarnya surat keputusan dari Kerapatan Nagari Kubang tanggal 16 April 1930, pengurus Ranting Muhammadiyah Kubang terpaksa menutup Sekolah Yatim beserta kursus-kursus Muhammadiyah. Surat keputusan tersebut diberikan oleh kepala Kerapatan Nagari Kubang kepada Ahmad Chatib selaku pengurus Sekolah Yatim. Penutupan Sekolah Yatim secara sepihak membuat konflik antara Muhammadiyah dengan otoritas adat di Kubang semakin tajam. Tanggal 18 April 1930, pengurus Muhammadiyah menemui Asisten Demang di Dangung-Dangung untuk membicarakan masalah penutupan Sekolah Yatim Muhammadiyah. Asisten Demang berpendapat bahwa penutupan Sekolah Yatim yang dilakukan oleh Kerapatan Nagari Kubang merupakan tindakan yang wajar karena Muhammadiyah belum berdiri secara resmi di dalam Nagari Kubang. Ahmad Chatib mengatakan bahwa Muhammadiyah Kubang telah berdiri secara resmi dan telah diakui oleh Muhammadiyah Padang Panjang sebagai salah satu grupnya. Hal ini belum diketahui oleh Asisten Demang karena pengurus Muhammadiyah belum melaporkannya.

Untuk menjelaskan permasalahan ini, pada tanggal 19 April 1930, Ahmad Chatib menemui kembali Asisten Demang dan memperlihatkan surat keputusan dari Muhammadiyah Payakumbuh yang mengakui keberadaan Muhammadiyah grup Kubang. Pada tanggal 22 April 1930, kepala Nagari Kubang menghadap *Controleur* untuk menanyakan status Muhammadiyah Kubang. Berdasarkan nasihat yang diberikan oleh *Controleur* kepada Wali Nagari Kubang, disepakati untuk membuka kembali Sekolah Yatim Muhammadiyah, tetapi kursus-kursus tetap ditutup. Sekolah Yatim Muhammadiyah dibuka kembali pada tanggal 23 April 1930, dihadiri langsung oleh *Controleur*. Walaupun Sekolah Yatim telah dibuka, penyelesaian masalah belum dirasa puas oleh pengurus Muhammadiyah Kubang karena kursus-kursus Muhammadiyah tetap tidak diizinkan oleh Kerapatan Nagari. Rasa tidak puas ini menyebabkan Ahmad Chatib menemui pimpinan Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto.

Tanggal 27 April 1930, Saalah Sutan Mangkuto datang ke Kubang. Sampai di sana, dikatakan agar pengurus Muhammadiyah beserta anggotanya diharap bersabar karena kejadian ini merupakan tanda bahwa Muhammadiyah akan hidup dan berkembang dalam Nagari Kubang. Malamnya, diadakan rapat di Muhammadiyah Cabang Payakumbuh yang dihadiri lebih kurang 40 orang pengurus dan anggota Muhammadiyah. Rapat dipimpin oleh H. Arsyad dengan sekretaris Muhammad Ilyas. Rapat tersebut menyepakati beberapa hal, di antaranya:

1. Mengirim telegram kepada *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta tentang penutupan Sekolah Yatim dan menanyakan kapan harus dibuka.
2. Sekolah malam bagi laki-laki dan siang bagi wanita serta Sekolah Yatim yang telah dibuka oleh *Controleur* ditutup kembali sampai mendengar kabar dari *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah.
3. Papan nama Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Yatim School Muhammadiyah dipasang, serta beberapa keputusan lain yang menyangkut permasalahan Muhammadiyah secara keseluruhan.

Berdasarkan kesepakatan pada rapat tersebut, dikirimkanlah telegram kepada *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta yang berisi tentang penutupan Sekolah Yatim Muhammadiyah. Sekolah Yatim ditutup kembali pada tanggal 28 April 1930. Penutupan Sekolah Yatim kembali oleh pengurus Muhammadiyah menyebabkan anggota Kerapatan Nagari Kubang memanggil H. Chatib dan menanyakan mengapa Sekolah Yatim ditutup kembali. Saat itu, penghulu dari kalangan Kerapatan Nagari Kubang meminta maaf kepada pengurus Muhammadiyah atas tindakan yang mereka lakukan. H. Chatib menanyakan mengapa kursus-kursus Muhammadiyah tidak diizinkan dibuka oleh Kerapatan Nagari Kubang. Sementara itu, pimpinan Muhammadiyah Padang Panjang mengirim telegram kepada Pimpinan Besar (PB) Muhammadiyah Yogyakarta yang isinya menceritakan masalah Kubang agar dibicarakan dengan

pemerintahan Belanda. Dalam hal ini, Gobe, yang mewakili pemerintah Belanda, mengkritik cara pemerintah setempat dalam penyelesaian masalah tersebut. Masalah tersebut kemudian dibawa Gobe kepada Gubernur Jenderal di Jakarta.

Setelah melalui perdebatan di kalangan pegawai tinggi, akhirnya pada bulan Desember tahun 1930, Gubernur Jenderal menginstruksikan agar *Gongrijp* atau Residen Sumatera Barat pada masa itu mengubah kebijakan dan memerintahkan untuk menyelesaikan masalah Kubang secara memuaskan. Akhirnya, Residen Sumatera Barat menyelesaikan masalah tersebut sehingga Sekolah Yatim Piatu dan kursus Aisyiyah dibuka kembali, dan organisasi Aisyiyah dapat berkembang di sana (Wawancara dengan Rosma Djanin). Maka, sejak meredanya konflik antara Muhammadiyah dan Kerapatan Adat Nagari Kubang, Aisyiyah Kubang semakin berkembang pesat. Sepuluh tahun kemudian (1940), Aisyiyah Kubang membeli sebidang tanah di Caniago Padang Kubang untuk mendirikan panti asuhan. Status Aisyiyah Kubang naik menjadi Cabang pada tahun 1940. Naiknya status menjadi cabang dikarenakan telah berdirinya sejumlah ranting, di antaranya Ranting Kubang, Ranting Siamang Bunyi, Ranting Sikince, Ranting Kota Sarikat, dan Ranting Lima Koto (Wawancara dengan Samsidar). Selain itu, Aisyiyah Kubang juga memiliki amal usaha seperti lima panti asuhan dan Raudhatul Athfal (setingkat TK).

Pada tahun 1942-1945, aktivitas Aisyiyah mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh pendudukan Jepang, di mana keberadaan organisasi otonom seperti Aisyiyah tidak diakui. Semua organisasi otonom di bawah Muhammadiyah dilebur menjadi satu dan kegiatan Aisyiyah dibatasi hanya pada pengajian saja. Kevakuman Aisyiyah Cabang Kubang berlanjut hingga revolusi kemerdekaan, karena seluruh tenaga dikerahkan untuk membangun Republik Indonesia.

SIMPULAN

Aisyiyah adalah organisasi otonom yang berada di bawah organisasi Muhammadiyah yang bergerak dan berjuang di tengah-tengah kaum ibu atau muslimah Indonesia. Sejak mendirikan Perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1912, KH. Ahmad Dahlan sudah menyadari betapa pentingnya peran dan keikutsertaan kaum wanita dalam gerakan dan perjuangan menyadarkan umat. Setelah mendapat bekal kepemimpinan, pada tahun 1914 Nyai Ahmad Dahlan tampil mendirikan organisasi kaum wanita pertama yang diberi nama *Sopo Tresno* (Siapa Cinta). Kegiatan perkumpulan ini mengutamakan bidang-bidang seperti tabligh, pendidikan, dan sosial. Lahirnya Aisyiyah seiring dengan berdirinya Muhammadiyah Kubang pada tanggal 25 Desember 1929, yang dipelopori oleh HN. Khalil, Darwis Muin, dan H. Mansyur. Berawal dari Aisyiyah Ranting Kubang yang didirikan dua bulan setelah disahkannya SK Muhammadiyah Ranting Kubang pada tanggal 25 Februari 1930 oleh Fatimah Luwis, istri dari H. M. Khatib, salah seorang pengurus Muhammadiyah pada masa itu. Perkembangan Aisyiyah di Kubang tidaklah semulus berdirinya Aisyiyah di Maninjau dan Padang Panjang yang relatif tanpa hambatan. Perkembangan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kubang dihadapkan pada konflik antara pimpinan Muhammadiyah Kubang yang aktif di Perserikatan Permusyawaratan dengan Kerapatan Adat Nagari Kubang. Konflik ini memuncak saat ditutupnya tiga sekolah milik Muhammadiyah, yakni Sekolah Yatim Muhammadiyah, Walasri School Aisyiyah, dan kursus agama di Kubang pada tanggal 16 April 1930. Konflik yang berlarut-larut tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui campur tangan Gubernur Jenderal Belanda yang memerintahkan Residen Sumatera Barat untuk menyelesaikan konflik antara Muhammadiyah dan Kerapatan Adat Nagari.

REFERENSI

- Abdullah, T., Zara, M. Y., & Pratama, A. (2018). *Sekolah dan Politik : Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927-1933*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Aisyiyah, P. P. (1992). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. (1982). *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogya: PT.Tiara Wacana.
- Mahabbah, S. S. St. (1983). Nyai Ahmad Dahlan Suami Isteri Pahlawan Kemerdekaan Nasional. *Suara Muhammadiyah No.24/63*.
- Martimin, M., Taher, I., Amir, & Mahyuddin. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Wieringa, S. (1998). *Kuntilanak Wangi: Organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra.